

## **BAB IV**

### **Strategi Kebijakan Ekonomi Hijau Jepang**

Banyaknya industri yang berdiri di setiap negara tentunya tidak jauh-jauh dari sampah yang dihasilkan dari sisa industri. Sampah sisa industri yang biasa disebut dengan limbah industri, biasanya limbah industri tersebut tidak langsung diolah melalui proses pemilihan, namun langsung dibuang begitu saja baik itu berupa asap industri yang dikeluarkan melalui cerobong asap industri tersebut atau bahkan limbah cair yang dikeluarkan melalui pipa air yang disalurkan ke perairan sekitar industri tersebut didirikan. Tentunya, dengan adanya hal tersebut membuang ekosistem di sekitar industri itu menjadi terancam. Limbah industri yang menumpuk dan tidak melalui proses penguraian terlebih dahulu tentunya memunculkan masalah baru seperti pencemaran akibat limbah industri.

Pencemaran akibat limbah industri sudah dirasakan oleh masyarakat di Negara Jepang khususnya masyarakat di Kota Minamata. Pencemaran limbah industri yang disebabkan oleh *Chisso Corporation* membuat perubahan besar untuk masyarakat di Kota Minamata. Limbah *Chisso Corporation* mencemari perairan yang digunakan sebagai mata pencaharian penduduk setempat. Hingga masalah tersebut diperbincangkan dalam forum Internasional. Pencemaran limbah tersebut lantas membuat Pemerintah Jepang harus berupaya mengembalikan segala bentuk citra buruk yang menimpa negaranya itu.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Jepang untuk mengembalikan Kota Minamata seperti semula tentunya tidak mudah. Upaya yang dilakukan

Pemerintah Negara Jepang pun beragam hingga Kota Minamata menjadi kota yang seperti semula. Adanya Tragedi Minamata tentunya membuat semua masyarakat di Negara Jepang mulai memahami bahwa hanya karena ketika tidak seimbannya sebuah ekosistem di sekitar lingkungannya akan berdampak buruk bagi manusia itu sendiri. Maka dari itu, masyarakat di Negara Jepang sedikit demi sedikit menyadari bagaimana pentingnya menjaga kualitas lingkungannya agar hal-hal semacam itu tidak terulang kembali. Inisiasi ini dimulai dari adanya perubahan pola pikir masyarakat yang kemudian direspon dengan baik oleh Pemerintah Jepang melalui kebijakan dari Pemerintah Jepang.

#### **A. Menjalinkan Kerjasama dengan Gerakan Chonaikai Jepang**

Pemerintah Jepang cenderung tidak dapat secara intensif melakukan upaya perbaikan citra buruk negaranya yang disebabkan oleh Tragedi Minamata tanpa adanya campur tangan dari publik khususnya masyarakat di Negara Jepang yang bersentuhan langsung dengan industri yang bersangkutan yaitu salah satunya melalui gerakan Chonaikai. Gerakan chonaikai merupakan gerakan yang di inisiasi oleh sekumpulan masyarakat yang memiliki pemikiran berbeda dari masyarakat lain mengenai lingkungan. Gerakan ini mengajak masyarakat di Negara Jepang untuk mengubah pola pikir masyarakat di Negara Jepang yang masih kurang peka terhadap adanya isu lingkungan. Pemerintah Jepang menanggapi bahwa gerakan ini merupakan gerakan yang cukup strategis yang dapat membantu percepatan proses pencitraan positif dan perbaikan kondisi di Kota Minamata. Dalam bab ini, akan dipaparkan lebih jelas mengenai apa saja

tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang dalam bekerja sama dengan gerakan chonaikai .

## **1. Gerakan Chonaikai**

Gerakan chonaikai merupakan sebuah gerakan yang bergerak dibidang lingkungan. Gerakan ini diinisiasi dari pemikiran publik yang semakin peduli akan masalah lingkungan yang ada di Negara Jepang. Gerakan ini tentunya didasarkan atas sikap sukarela setiap masyarakat yang sudah terbuka dengan masalah lingkungan yang nantinya ketika masalah lingkungan dibiarkan begitu saja tentunya memiliki efek yang buruk bagi lingkungan tinggal masyarakat di Negara Jepang itu sendiri. Dengan aktifnya gerakan chonaikai di Negara Jepang, tentunya sama dengan membantu memudahkan Pemerintah Jepang dalam melaksanakan penerapan kebijakan ekonomi hijau .

### **a. Konsep Dasar Gerakan Chonaikai Jepang**

Banyaknya kepedulian masyarakat di Negara Jepang membuat lahirnya sebuah gerakan atau organisasi yang bernama gerakan chonaikai. Chonaikai berarti gerakan masyarakat peduli terhadap lingkungan. Pada dasarnya, chonaikai sudah ada sejak *pasca* perang dunia kedua. Chonaikai awalnya merupakan bentuk tradisional dari sebuah komunitas, di dalam chonaikai terdapat kelompok rumah tangga yang dibagi menjadi sebuah daerah atau pemerintahan yang kemudian dibentuk menjadi sebuahosiasi. Mulanya, gerakan ini hanya digunakan sebagai gerakan ketika adanya bencana alam ataupun sejenisnya. Namun, ketika masa pendudukan Negara Jepang oleh Negara Amerika Serikat, gerakan ini

dibubarkan.<sup>1</sup> Perkembangan ekonomi yang mulai pesat terjadi pada tahun 1950-an tahun dimana juga pada tahun tersebut terlihat beberapa kejanggalan-kejanggalan yang menimpa Kota Minamata.

Asosiasi lingkungan ini mulai terbentuk secara sukarela dan sekitar pada tahun 1970, mulai aktif kembali. Peningkatan kepedulian dan tingkat sukarela masyarakat di Negara Jepang untuk bergabung mengikuti asosiasi lingkungan ini terjadi pada akhir tahun 1980.<sup>2</sup> Chonaikai sendiri ada sejak pada pemerintahan Meiji, yang berarti chonaikai merupakan organisasi yang resmi dari Pemerintah di Negara Jepang dan sering dikendalikan oleh tokoh-tokoh yang kuat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

Namun, chonaikai saat ini merupakan sebuah kelompok warga di daerah tertentu. Kelompok-kelompok ini dibagi berdasarkan kedekatan perumahan, sebagian besar terdiri 100 hingga 300 rumah tangga yang tergabung. Anggota yang tergabung dalam chonaikai biasanya membayar iuran rutin, memilih pemimpin mereka, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bersama-sama. Sebagian besar kegiatan chonaikai menekankan pada isu yang terdapat di dalam masyarakat lokal, mulai dari membersihkan taman yang berada wilayah lokal, menyusun program untuk menjaga lingkungan, mengorganisir acara lokal seperti olahraga, memfasilitasi acara festival lokal serta masih banyak kegiatan yang lain.

Di sisi lain peran chonaikai secara umum dapat dikategorikan menjadi dua peran yaitu :

---

<sup>1</sup> Puntita Tanwattana, "Significance of Institutionalization and Changes of Chonaikai (Neighborhood Association) in Japanese Society", [http://www.ps.ritsumei.ac.jp/assoc/policy\\_science/192/192\\_09\\_puntita.pdf](http://www.ps.ritsumei.ac.jp/assoc/policy_science/192/192_09_puntita.pdf), diakses pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 21.21 WIB

<sup>2</sup> *Ibid.*

1. Sebuah peran resmi sebagai hubungan antara pemerintah daerah dalam hal keterbukaan informasi, manajemen anggaran, kegiatan olahraga, kegiatan orang tua, dll;
2. Peran tambahan melalui inisiatif lokal seperti acara festival, visi, perencanaan, dll.

Mengenai sebutan peran resmi chonaikai, masing-masing chonaikai memiliki tanggung jawab khusus dan wajib menjadi mediator antara warga dan pemerintah daerah. Namun, tidak setiap chonaikai berhasil dalam peran tambahannya secara signifikan semua kembali tergantung pada pemimpinnya.

**b. Kegiatan Gerakan Chonaikai**

Masalah sampah yang diakibatkan oleh limbah industri di Negara Jepang khususnya *Chisso Corporation* belum selesai begitu saja seperti yang sudah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Pemerintah menuntut *Chisso Corporation* untuk mengganti rugi atas apa yang sudah terjadi di Kota Minamata itu. Namun, ganti rugi yang dilakukan oleh *Chisso* tidak cukup membuat Kota Minamata kembali seperti semula. Masyarakat yang berada disekitar Teluk Minamata pastinya mengalami trauma yang sangat besar mengingat keluarganya atau bahkan tetangganya yang terkena penyakit Minamata. Masyarakat yang bukan penduduk Kota Minamata juga turut prihatin akan musibah yang menimpa saudara-saudaranya di Kota Minamata.

Tragedi Minamata membuat masyarakat di Negara Jepang tidak terkecuali bersama-sama membuat negaranya menjadi lebih baik dalam menjaga ekosistem di sekitarnya. Tragedi Minamata membuat perubahan besar bagi Negara Jepang

baik itu keadaan masyarakatnya ataupun negaranya. Kesadaran akan menjaga lingkungan sedikit demi sedikit mulai meningkat semenjak terjadinya tragedi Minamata yang menyerang masyarakat di Negara Jepang. Tentunya lahirnya kesadarannya itu tidak begitu saja terjadi, melainkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap dan pola pikir masyarakat di Negara Jepang. Adanya perubahan sikap dan pola pikir masyarakat di Negara Jepang di inisiasi oleh gerakan chonaikai sebagai asosiasi lingkungan.

Asosiasi lingkungan memiliki peran yang penting tentunya bagi negara yang memiliki industri besar dan maju seperti Negara Jepang. Mengingat banyak sekali industri yang berada di Negara Jepang menandakan bahwa, limbah industri yang dihasilkan Negara Jepang pun juga melimpah. Ada pun asosiasi lingkungan itu sendiri dapat dikatakan sebagai kelompok advokasi yang dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu :

1. *Transmission belt*, melakukan komunikasi dengan isu-isu lokal kemudian membuat tuntutan terhadap pemerintah daerah;
2. Memberi contoh bagaimana asosiasi lingkungan dapat menentang inisiatif pemerintah.
3. Asosiasi lingkungan harus cenderung kooperatif dengan Pemerintah kecuali di bawah persoalan yang medesak.<sup>3</sup>

Ketiga aspek di atas telah dilakukan oleh chonaikai sebagai gerakan asosiasi lingkungan yang sekaligus sebagai kelompok advokasi terhadap Pemerintah di Jepang. Pada sekitar tahun 1960 hingga 1970-an, chonaikai

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

melakukan komunikasi dengan masyarakat yang bersangkutan dengan isu-isu lokal seperti isu Minamata. Pada awalnya isu Minamata hanya menjadi isu lokal saja, namun kemudian isu tersebut menjadi perbincangan banyak pihak yang kemudian menjadi isu besar yang diperbincangkan oleh banyak negara. Peran chonaikai kemudian menyalurkan segala bentuk pemikiran atau keluhan yang dialami masyarakat yang terkait dengan isu lokal itu kepada Pemerintah Jepang. Namun, yang dilakukan Pemerintah Jepang masih dianggap kurang karena masih tidak seimbang hukuman yang diberlakukan Pemerintah kepada *Chisso* dengan apa yang sudah dialami masyarakat di Kota Minamata. Tentunya chonaikai sebagai gerakan asosiasi lingkungan menentang tindakan pemerintah yang dianggap kurang tegas meskipun chonaikai di bawah pengawasan langsung pemerintah, namun hal tersebut tidak membuat chonaikai sepenuhnya selalu sejalan dengan Pemerintah Jepang. Chonaikai mengubah pola pikir masyarakat agar lebih terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi dan memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya terhadap *Chisso*.

Sebagai gerakan asosiasi lingkungan, tentunya chonaikai tidak mengiinginkan tragedi yang menimpa Kota Minamata terjadi kembali di negaranya, maka dari itu peran chonaikai untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli lagi terhadap isu lingkungan tentunya menjadi poin yang penting dalam hal ini. Dengan adanya gerakan asosiasi lingkungan khususnya chonaikai ini tentunya mempermudah bagi masyarakat di Negara Jepang untuk melakukan segala tindakan yang positif untuk lingkungannya termasuk dalam kasus Tragedi Minamata. Dengan aktifnya kembali chonaikai, Masyarakat Jepang khususnya

yang tinggal di Kota Minamata dapat mendapat perlindungan dari Pemerintah dengan melalui aspirasi atau aksi nyata yang dibuat chonaikai tersebut. Hal tersebut tentunya membuahkan hasil yang sedikit demi sedikit terlihat.

Adanya penurunan jumlah permintaan produksi dalam industri manufaktur mulai dari tahun 1955 hingga 1995 yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor salah satunya merupakan adanya kasus tragedi Minamata. Kasus tersebut menjadi perbincangan besar masyarakat di Negara Jepang. Hingga kemudian chonaikai sebagai gerakan asosiasi yang bergerak dalam masalah lingkungan muncul dengan aksi nyata untuk membantu masyarakat di Negara Jepang. Dengan berbagai kabar buruk mengenai *Chisso Corporation* sebagai salah satu industri manufaktur di Negara Jepang tentunya semakin mempermudah chonaikai untuk mengajak publik agar lebih berhati-hati dalam memilih produk yang digunakan. Apakah produk tersebut diproduksi secara aman dan memiliki efek yang baik setelah digunakan atau malah sebaliknya. Hal tersebut tentunya dilakukan oleh chonaikai sebagai bentuk aksi nyatanya dalam Tragedi Minamata. Berikut dipaparkan tabel dari tahun 1955 mengenai buku tahunan pertumbuhan jumlah total faktor produksi.



**Tabel 4.1**  
**Buku Tahunan Pertumbuhan Jumlah Total Faktor Produksi Jepang**

	1955-70	1970-80	1980-95
<b>Manufacturing</b>	<b>6.0</b>	<b>2.1</b>	<b>2.3</b>
Light manufacturing	2.7	1.7	0.2
Materials	9.2	-1.9	0.6
Machinery	11.9	7.6	5.5
<b>Non-manufacturing</b>	<b>4.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>
Construction	2.7	-2.9	0.3
Finance/utility/T&T	6.4	1.8	0.7
Distribution & service	3.3	-0.1	0.2

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa, permintaan produksi manufaktur di Negara Jepang mengalami penurunan yang cukup drastis dan mengalami sedikit kenaikan. Pada tahun 1955 hingga 1970 sebesar 6.0., namun setelah lepas dari tahun 1970, jumlah produksi hanya 2.1, itu berarti menandakan bahwa produksi yang diminta menurun hingga 3.9. Kemudian setelah tahun 1980 hingga 1995 produksi naik menjadi 2.3 dari 2.1. Untuk produksi *non* manufaktur sendiri juga sama halnya mengalami penurunan. Tahun 1955 hingga 1970 angka mencapai 4.2 namun setelah tahun 1970 hingga 1980 menjadi 0.3 dan angka tersebut stabil hingga tahun 1995.

Penurunan tersebut tentunya menjadi ketakutan sendiri bagi Pemerintah Jepang karena dengan adanya penurunan jumlah permintaan produksi manufaktur biasanya juga akan mempengaruhi nilai *Gross Domestic Product Jepang*. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu bukti bahwa citra buruk yang diterima Negara Jepang ada dan mempengaruhi sistem keberlangsungan di Negara Jepang

seperti dalam hal perekonomian yaitu menurunnya permintaan produksi baik itu dalam negeri maupun luar negeri.

Terbentuknya asosiasi lingkungan ini sebenarnya di dasari atas mulai tumbuhnya kepedulian terhadap isu-isu baik itu lingkungan maupun sosial. Maka dari itu, Pemerintah Jepang mulai melihat bahwa gerakan chonaikai ini memiliki peran yang penting di dalam masyarakat Jepang. Gerakan ini juga membuat masyarakat di Negara Jepang menjadi lebih peduli dan peka mengenai bagaimana cara mengolah sampah dengan baik sehingga nantinya tidak ada lagi Tragedi Minamata yang lainnya yang menimpa Negara Jepang. Chonaikai ingin membuat masyarakat di Negara Jepang sadar dan harus mengingat bahwa Tragedi Minamata harus terjadi sekali saja dalam sejarah Negara Jepang karena tragedi tersebut merupakan salah satu bentuk kejahatan yang secara tidak langsung menimpa seluruh masyarakat di Negara Jepang.

Melihat chonaikai yang sukses sebagai asosiasi lingkungan yang berpengaruh di Negara Jepang, Pemerintah Jepang sangat mendukung chonaikai dengan bekerjasama dengan gerakan tersebut. Pemerintah Jepang sangat mendukung positif dengan adanya gerakan itu mengingat chonaikai menjadi salah satu poin penting dalam perubahan pola pikir masyarakat mengenai isu lingkungan dan mengingat dengan apa yang sudah dialaminya mengenai pencemaran lingkungan akibat tingginya laju industri yang saat itu sedang menjadi salah satu sektor perekonomian di Negara Jepang. Maka dari itu harus ada tindakan sebagai lanjutan dari aksi nyata di atas oleh Pemerintah Jepang.

Dukungan Pemerintah Negara Jepang pun diikuti dengan adanya upaya formal sebagai bentuk kelanjutan dari gerakan chonaikai

### **1. Kerjasama Pemerintah Jepang dengan Chonaikai**

Gerakan chonaikai memiliki peran yang penting di dalam lingkungan masyarakat di Negara Jepang. Gerakan asosiasi lingkungan ini berhubungan langsung dengan pemerintahan. Adanya chonaikai *pasca* Tragedi Minamata tersebut merupakan salah satu bentuk strategi Pemerintah Jepang dalam menangani isu lingkungan yang sedang dihadapinya. Chonaikai membuat masyarakat di Negara Jepang sedikit demi sedikit menyadari sangat pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di sekitarnya. Dengan menjaga sebuah ekosistem sekitar, diharapkan ke depannya Negara Jepang dapat menjadi contoh negara industri dengan ekosistem yang seimbang.

Pemerintah Jepang mendukung gerakan chonaikai karena dianggap sebagai salah satu gerakan yang dapat bersinggungan langsung dengan masyarakat di Kota Minamata pada saat itu. Kemudian kerjasama Pemerintah dengan Chonaikai terjalin mengingat latar belakang gerakan yang bergerak di bidang lingkungan itu. Kerjasama tersebut diantaranya adalah :

1. Merumuskan undang-undang *The Basic Act on Establishing a Sound Material-Cycle Society*.

Pemerintah mendukung gerakan tersebut untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai dasar daur ulang. Undang-undang berupa *The Basic Act on Establishing a Sound Material-Cycle Society* diumumkan pada

Juni 2000, namun baru beroperasi pada Januari 2001.<sup>4</sup> Tujuan dari dibentuknya ini menciptakan siklus material yang baik, dengan mengonsumsi sumber daya alam secara terkendali dan telah mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dengan cara mengkaji produksi massa, konsumsi massa, masyarakat penghasil limbah masal, dan gaya hidup orang serta memastikan daur ulang material di masyarakat. Nantinya hasil dari undang-undang tersebut adalah untuk mengurangi konsumsi sumber daya alam yang terkait dengan penggunaan dan pembuangan produk dan untuk mengurangi beban lingkungan dengan mendaur ulang bahan di masyarakat.<sup>5</sup>

Undang-undang *The Basic Act on Establishing a Sound Material-Cycle Society* juga menetapkan urutan prioritas dalam pengolahan limbah untuk pertama kalinya di Negara Jepang yaitu :

1. Pengurangan jumlah limbah;
2. Penggunaan kembali produk / bagian;
3. Bahan daur ulang;
4. Daur ulang termal dan;
5. Pembuangan yang tepat.

Dengan adanya undang-undang tersebut, masyarakat di Negara Jepang menjadi semakin terarah untuk menjaga kelestaraan ekosistem yang ada. Masyarakat di Negara Jepang belajar mengenai bagaimana cara mengolah limbah dengan baik dan benar. Kasus tragedi Minamata merupakan kasus dimana sebuah industri maju yang memiliki keuntungan yang besar dalam industrinya tidak dapat mengolah limbah dari hasil industrinya dengan baik sehingga mengakibatkan

---

<sup>4</sup> Global Environment Centre, "Laws and Support Systems for Promoting Waste Recycling in Japan", <http://nett21.gec.jp/ECotowns/LawSupportSystems.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 14.48 WIB

<sup>5</sup> *Ibid.*

bencana bagi masyarakat di sekitar industri tersebut bahkan menjadi perbincangan Internasional.

2. Mengeksekusi gerakan lanjutan dari undang-undang *The Basic Act on Establishing a Sound Material-Cycle Society* dengan gerakan 3R.

Tindakan yang dilakukan dalam 3R yaitu adalah *reduce, reuse, recycle*. *Reduce* berarti Turunkan pembuangan limbah dengan mengembangkan proses produktif baru. Hal ini termasuk membuat pengurangan sampah dengan insinerasi dan kekeringan. *Reuse* sendiri berarti limbah digunakan ulang. Misalnya, gunakan kembali setelah mencuci botol kaca yang dikumpulkan. Sedangkan *recycle*, yaitu dengan konversi sampah menjadi sumber daya lagi dengan menggunakan energi.<sup>6</sup> Misalnya, membangun kembali botol kaca setelah menghancurkan botol kaca yang dikumpulkan, dan menggunakannya sebagai bahan trotoar atau aspal jalan. Dengan diberlakukannya tindakan 3R tersebut dalam *The Basic Act on Establishing a Sound Material-Cycle Society*. Pemerintah Jepang ingin menciptakan masyarakat yang lebih berwawasan lingkungan setelah adanya kasus Tragedi Minamata sebagai kasus kerusakan lingkungan yang berdampak sangat fatal bagi kelangsungan hidup masyarakat di Negara Jepang.

## **B. Menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan Sebagai Kebijakan Ekonomi Hijau Jepang**

Teknologi yang digunakan Negara Jepang tentunya dari masa ke masa selalu mengalami perubahan yang semakin pesat. Pemerintah Jepang mengambil

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

langkah prioritas terhadap industrinya agar berkembang pesat menjadi teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan di sini yang dimaksud adalah, memperbaiki teknologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekitar. Kasus Tragedi Minamata yang menimpa Negara Jepang tentunya menjadi cerminan bahwa kegagalan akibat industri maju yang kurang memperhatikan lingkungan sekitar berdampak besar pada negaranya. Bukan hanya dikalangan masyarakat di Negara Jepang. Namun, melainkan kasus tersebut menjadi pembicaraan diforum-forum internasional.

Pada tahun 2011 tepatnya antara 16 hingga 18 November, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri atau (METI), Pemerintah Jepang, dan *United Nations Industrial Development Organization* atau (UNIDO) mengadakan *Tokyo Green Industry Conference* atau (TGIC) sebagai tindak lanjut dari konferensi sebelumnya yang diselenggarakan di Manila. *Tokyo Green Industry Conference* atau (TGIC) menggaris bawahi ketersediaan lingkungan dan teknik konservasi sumber daya dan praktik yang bagus untuk bisnis, lingkungan dan iklim, para pekerja, komunitas dan konsumen. Dengan adanya kebijakan dari *Tokyo Green Industry Conference* atau (TGIC) sebagai inovasi untuk memberikan solusi jangka panjang yang nantinya memungkinkan pengurangan penggunaan sumber daya yang lebih besar dan mengurangi intensitas polusi seperti yang dialami di Kota Minamata.

Banyak industri yang menggunakan bahan dan energi yang melebihi kapasitas untuk produksinya, sehingga hal tersebut tentunya membahayakan bagi ketersediaan sumber daya yang ada. Tentunya ini tidak dianjurkan karena dengan

adanya penggunaan bahan-bahan dan energi yang melebihi kapasitas, ketersediaan untuk energi jangka panjang akan semakin menipis. Selain itu, Pemerintah Jepang membuat terobosan sebuah teknologi baru. Teknologi untuk lebih ramah lingkungan atau *green industry*.

*Tokyo Green Industry Conference* menghasilkan beberapa regulasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Jepang agar kejadian seperti Tragedi Minamata hanya terjadi sekali sepanjang sejarah Negara Jepang. Berikut dipaparkan beberapa regulasi mengenai *green industry*.

1. Penghijauan industri: Penghijauan industri di sini dimaksudkan adalah memungkinkan dan mendukung semua industri tanpa memandang sektor, ukuran atau lokasinya sebagai penghijauan operasi, proses dan pembuatan produksi.
  - a.) Gunakan efisiensi sumber daya: Meningkatkan penggunaan bahan baku, air dan energi secara produktif dalam produksi industri. Hal itu dilakukan melalui pendekatan seperti dematerialisasi produk, penggunaan bahan dengan masa pakai yang lebih lama, penggantian bahan baru dengan bahan daur ulang, mendaur ulang, penggunaan kembali dan pemulihan bahan, energi dan air, dan penggunaan bahan, air dan energi dari sumber yang dikelola secara lestari dan atau dampak rendah;
  - b.) Meminimalkan jumlah pembuangan limbah dan emisi: Meminimalkan dan jika mungkin menghilangkan adanya limbah dan emisi di dalam industri. Hal tersebut dilakukan melalui pendekatan seperti perbaikan dalam proses operasi, pemantauan dan pemeliharaan, minimisasi limbah dengan penerapan kemajuan

proses teknologi dengan efisiensi dan spesifisitas yang lebih tinggi dan daur ulang, penggunaan kembali dan pemulihan proses aliran sungai;

c.) Meminimalkan risiko yang terkait dengan limbah bahan kimia dan pembuangan limbah berbahaya : Meminimalkan risiko yang terkait dengan produksi, penggunaan, dan pelepasan bahan kimia, melalui pendekatan seperti pengelolaan bahan kimia yang baik (bertujuan untuk mencapai tujuan 2020 WSSD), pentahapan keluar dari zat beracun dan bahan berbahaya lainnya (termasuk yang berkontribusi terhadap penipisan lapisan ozon dan atau perubahan iklim), penerapan praktik lingkungan terbaik dan teknik terbaik yang tersedia untuk mencegah pembentukan dan emisi POPs dan polutan berbahaya lainnya yang tidak diinginkan, penggantian proses kimiawi dengan proses *non* kimia (biologis, fisik, dll), dan penggantian dengan bahan kimia alternatif yang lebih aman, lebih spesifik dan atau lebih efektif.

2. Menciptakan industri hijau : Menetapkan dan memperluas industri hijau yang memasok jasa dan lingkungan yang baik.

a.) Mendukung industri untuk mengembangkan dan memberikan pengelolaan limbah terpadu yang canggih, daur ulang dan teknologi pemulihan sumber daya, layanan dan sistem untuk kota, komersial, industri, konstruksi, pembongkaran dan aliran limbah khusus lainnya, dan menghasilkan pasokan bahan daur ulang dan produk yang dapat diandalkan;

b.) Meningkatkan efisiensi energi industri dan memanfaatkan energi terbarukan: Mendukung industri untuk memberikan teknologi, peralatan, produk, sistem manajemen, tahu bagaimana dan atau layanan yang



meningkatkan efisiensi energi industri dan penggunaan energi terbarukan (solar, bio-dll) atau yang lain sumber energi rendah karbon (terutama limbah panas);

c.) Mengumpulkan, mengelola dan membuang limbah berbahaya dan atau emisi dengan cara yang sesuai lingkungan: Mendukung industri untuk mengembangkan dan menyampaikan teknologi, peralatan, produk, sistem manajemen, tahu bagaimana dan atau layanan yang mengumpulkan, mengelola dan membuang tanpa ancaman terhadap lingkungan, limbah berbahaya dan atau emisi termasuk misalnya limbah kimia dan medis, limbah elektronik, dll.<sup>7</sup>

Dengan adanya kebijakan yang dihasilkan dari *Tokyo Green Industry Conference* atau (TGIC) pada 2011, tentunya menjadikan Pemerintah Jepang untuk membuat industrinya menjadi lebih ramah lingkungan. Industri yang lebih ramah lingkungan tentunya membuat langkah Negara Jepang dalam menciptakan Ekonomi Hijau sedikit demi sedikit tereralisasi. Industri yang ingin mendirikan perusahaannya di Negara Jepang tentunya harus mengikuti aturan atau kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Jepang.

Regulasi di atas tentunya diberlakukan oleh Pemerintah Jepang untuk industri yang akan mendirikan usahanya di Negara Jepang. Industri yang mengikuti regulasi tentunya akan memudahkan perijinan pendirian industrinya di Negara Jepang tetapi Pemerintah Jepang juga menerapkan atau memberlakukan pajak lingkungan atau yang dikenal dengan *green tax* bagi industri yang melanggar regulasinya. *Green tax* sendiri merupakan sebuah pajak yang

---

<sup>7</sup> Unido, "Tokyo Green Industry Conference 2011", [http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Tokyo\\_Green\\_Industry\\_Conference\\_UNIDO.pdf](http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Tokyo_Green_Industry_Conference_UNIDO.pdf), diakses pada 23 Mei 2017 pukul 12.30 WIB

diberlakukan oleh Pemerintah Jepang sebagai antisipasi kepada perusahaan yang tetap memproduksi produk-produk yang tidak ramah lingkungan yang kemudian nantinya akan membahayakan dan berdampak buruk bagi Negara Jepang itu sendiri. Ketika diterapkannya *green tax*, Pemerintah Jepang menjadi tahu tingkat ramah lingkungan suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Semakin tidak ramah lingkungan produk industri yang dihasilkan, maka semakin tinggi pajak lingkungan yang diberlakukan oleh Negara Jepang untuk perusahaan tersebut. Hal ini tentunya membuat Negara Jepang menjadi salah satu negara yang cukup berhasil dalam penerapan *green tax*.<sup>8</sup>

**Tabel 4.2**  
**Peringkat Negara Penggunaan *Green Tax* Berdasarkan KPMG 2013**

GREEN VEHICLES	
Japan	1
France	2
UK	
US	4
Belgium, China, Ireland, Spain	5

Dari tabel di atas tampak bahwa pada tahun 2013, Negara Jepang menduduki peringkat pertama untuk negara menggunakan *green tax*. Pada tahun yang sama, Negara Jepang juga menduduki peringkat pertama dalam *Renewable Energy & Fuels* seperti yang tampak pada tabel di bawah ini.

<sup>8</sup> KPMG, "The KPMG Green Tax Index 2013", <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/08/kpmg-green-tax-index-2013.pdf>, diakses pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 16.17 WIB

**Tabel 4.3**  
**Peringkat Negara Berdasarkan Pada Teknologi Dalam *Renewable Energy & Fuels* Menurut KPMG 2013**

RENEWABLE ENERGY & FUELS	
<b>US</b>	<b>1</b>
Japan	2
Canada	3
India	4
Ireland	

Hal tersebut tentunya dilakukan oleh Pemerintah Jepang sebagai bentuk kewaspadaan dan kepededulian terhadap masalah lingkungan, agar kejadian yang sudah menimpa Kota Minamata tidak terulang. Contohnya yang dilakukan oleh Negara Jepang terhadap salah satu perusahaan yaitu *Chisso* diantaranya sebagai berikut :

1. Membuat peringatan agar *Chisso* tidak menggunakan bahan-bahan untuk pembuatan produknya yang dilarang dan berbahaya bagi lingkungan,
2. Menerapkan ganti rugi kepada para korban yang terkena *Minamata Disease*,
3. Mengancam akan menutup *Chisso* apabila masih memproduksi barang-barang yang berbahaya bagi lingkungan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Jepang telah menerapkan strategi kebijakan ekonomi hijau di negaranya hingga pada tahun 2017 sudah ada sebanyak sekitar 425 perusahaan yang menerapkan industri ramah lingkungan yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Jepang.<sup>9</sup> Sedangkan perusahaan yang berasal dari Negara Jepang sendiri diantaranya meliputi

---

<sup>9</sup> Environmental Xprt, “Environmental Industry Companies in Japan”, <http://www.environmental-expert.com/companies/location-japan>, diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 06.16

*VPEC Inc., Asada Corporation, Chiyoda Corporation, Aquatech. Ltd.*, dan lain sebagainya.

Dengan sudah adanya industri di atas membuktikan bahwa Negara Jepang dengan sungguh-sungguh melakukan perubahan dalam sektor industrinya. Kerjasama dengan Chonaikai itu menjadi salah satu model bagaimana Pemerintah Jepang melibatkan publik dalam kebijakan ekonomi hijau di Negara Jepang.